



Pendekatan Partisipatif Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja: Studi Program ALAKE Singkawang (Participatory Approach in Performance-Based Budgeting: A Study of the ALAKE Program in Singkawang)

Firdaus^{1*}, Hasymi Rinaldi²
Universitas Tanjungpura^{1*}, Politeknik Negeri Pontianak²
Firdaus_darkatni@fisip.untan.ac.id^{1*}, hasymir@gmail.com²

*penulis korespondensi

Keywords: *Ecological Fiscal Transfer, ALAKE, green budgeting, fiscal decentralization, sustainable governance.*

ABSTRACT

Fiscal decentralization in Indonesia has not yet achieved its expected outcomes in promoting efficiency, transparency, and environmental sustainability. To address these issues, the Indonesian government introduced the Ecological Fiscal Transfer (EFT) framework, which integrates ecological indicators into fiscal allocation formulas. One of its local adaptations is the Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE), or Ecological Village Budget Allocation, implemented in Singkawang City. This study aims to analyze the implementation of ALAKE within the EFT policy framework and identify strategic programs and sub-activities that support its performance indicators. A mixed-methods approach was applied through document analysis, field observations, and Focus Group Discussions (FGD) involving 26 urban villages. The findings reveal that ALAKE effectively integrates fiscal and ecological goals through participatory planning and green budget tagging. Priority actions include waste management, drainage maintenance, urban greening, and disaster preparedness. However, challenges remain in data standardization, administrative capacity, and incentive mechanisms. The study concludes that ALAKE represents an innovative micro-level fiscal policy instrument that links ecological performance with budgetary incentives, offering a replicable model for sustainable local governance and equitable fiscal policy in other regions of Indonesia.

Kata Kunci: *Ecological Fiscal Transfer, ALAKE, anggaran hijau, desentralisasi fiskal, tata kelola berkelanjutan*

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya mencapai tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan kerangka *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) yang mengintegrasikan indikator ekologis ke dalam formula alokasi fiskal. Salah satu bentuk

adaptasinya di tingkat lokal adalah *Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi* (ALAKE) yang diterapkan di Kota Singkawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ALAKE dalam kerangka kebijakan EFT serta mengidentifikasi program dan subkegiatan strategis yang mendukung indikator kinerja ALAKE. Penelitian menggunakan pendekatan campuran melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan 26 kelurahan di Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALAKE mampu mengintegrasikan tujuan fiskal dan ekologis melalui perencanaan partisipatif dan mekanisme *green budget tagging*. Aksi prioritas yang dihasilkan meliputi pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, penghijauan perkotaan, dan kesiapsiagaan bencana. Meskipun demikian, tantangan masih muncul pada aspek kapasitas administratif, standarisasi data, dan mekanisme insentif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ALAKE merupakan instrumen kebijakan fiskal mikro yang inovatif dan berpotensi direplikasi sebagai model tata kelola fiskal berkelanjutan dan berkeadilan di daerah lain di Indonesia.

JEL CLASSIFICATION: J38

How to cite: Firdaus, & Rinaldi, H. (2025). Pendekatan Partisipatif Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja: Studi Program ALAKE Singkawang (Participatory Approach in Performance-Based Budgeting: A Study of the ALAKE Program in Singkawang). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(2), 174–189.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Dinamika pertumbuhan di wilayah perkotaan terutama di Kota Singkawang berdampak pada tekanan lingkungan hidup akibat aktivitas pembangunan yang bergerak dinamis. (Lisanyoto et al., 2019). Hasil penelitian menyebutkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang ada membutuhkan upaya kolaboratif dari masyarakat dan para pihak untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi guna memastikan manfaat didapat signifikan diterima oleh masyarakat (Widiastuti et al., 2024). Di dalam perencanaan Pemerintah Kota Singkawang jangka menengah, isu lingkungan hidup masih menjadi masalah serius dalam pembangunan di Kota Singkawang. Dua masalah utama lingkungan yang terangkum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2025-2029 adalah rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masalah sampah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup berada dibawah rata-rata kualitas kabupaten/ kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

Tabel 1. IKLH Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	70,07	72,90	71,90	73,73	74,05
Kota Singkawang	55,3	63,22	61,5	68,12	68,27

Sumber: data diolah

Bahkan, rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Singkawang diperparah dengan luasnya lahan kritis di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (DLH, 2024) menunjukkan bahwa lahan dengan status kritis adalah seluas $\pm 6.129,15$ Ha yang tersebar di 17 Kecamatan, sedangkan lahan dengan status sangat kritis adalah seluas $\pm 143,63$ Ha yang tersebar di 4 Kecamatan. Data tersebut menunjukkan bahwa luas lahan kritis dan sangat kritis mencapai sekitar 12% dari total luas Kota Singkawang. Sebagian besar kawasan kritis tersebut berada pada lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ataupun bekas kawasan PETI, dan juga pada kawasan penambangan pasir (RPJMD, 2025). Termasuk juga permasalahan terhadap hutan mangrove dan upaya untuk merehabilitasinya (Astiani et al., 2024).

Dalam konteks sampah, estimasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, mengacu pada jumlah penduduk, timbunan sampah yang dihasilkan adalah sekitar 35,4 ribu ton per tahun. Dalam hal penanganannya, Pemerintah Kota Singkawang dapat dianggap memiliki kemampuan dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (DLH, 2024) menunjukkan bahwa Kota Singkawang berhasil mengelola sampah sebesar 98% dengan berhasil mengurangi sampah sebanyak 3,9 ribu ton, dan menangani sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir sebesar 30,8 ribu ton. Meskipun target pengurangan sampah tidak tercapai, yaitu hanya mampu mengurangi sebesar 11,13% dari target 28%, namun kemampuan tersebut berada pada peringkat kedua tertinggi dibandingkan dengan 14 kabupaten/ kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

Permasalahannya adalah bencana banjir merupakan kejadian tahunan di Kota Singkawang. Sampah dianggap sebagai salah satu sumber bencana tersebut. Berdasarkan data pada RPJMD Kota Singkawang 2025-2029, seluas 28% wilayah Singkawang rentan terhadap

banjir. Bahkan dari seluruh kawasan di Kota Singkawang, seluas 66% wilayah tidak memiliki kemampuan menyerap air (DLH, 2024).

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah lingkungan, Singkawang menerapkan skema *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) dalam arah kebijakan strategis RPJMD Tahun 2025-2029 untuk memperkuat kinerja kelurahan. EFT merupakan mekanisme transfer keuangan antar pemerintah (intergovernmental fiscal transfer) yang mengintegrasikan indikator ekologis ke dalam formula alokasi dana, sehingga daerah dengan kinerja lingkungan yang baik memperoleh insentif fiskal lebih besar (Droste et al., 2018). Instrumen EFT dikembangkan dari mekanisme transfer fiskal konvensional antar tingkat pemerintahan, dengan mengintegrasikan kriteria kinerja lingkungan ke dalam formula alokasi dana (Firdaus et al., 2025). Tujuan utamanya adalah memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan (Irawan et al., 2014). Indikator mengedepankan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup memungkinkan pemerintah daerah dengan kinerja lingkungan yang baik menerima alokasi transfer fiskal yang lebih besar sebagai bentuk insentif (Schröter-Schlaack et al., 2014).

Keberadaan EFT di Indonesia sebagai respon rendahnya kualitas proses penganggaran partisipatif di Indonesia. Indonesia masuk dalam kategori rendah dari skala 1-100, dibawah rata-rata skor global (melibatkan 125 negara) di angka 15 ((IBP), 2024). Selaras dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Indonesia belum menunjukkan optimisme dalam mengatasi kesenjangan. Sejumlah penelitian masih menyoroti inefisiensi layanan pemerintah, peningkatan penyediaan layanan publik serta ancaman korupsi (Galasso & Ravallion, 2005). Padahal desentralisasi mendorong peran pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat (Kalirajan & Otsuka, 2012). Desentralisasi juga memberi ruang pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan di tingkat komunitas (Irawan et al., 2014).

Merespon tantangan itu, Pemerintah Indonesia telah menginternalisasi penerapan pendanaan insentif kinerja untuk pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam regulasi tercatat mekanisme dapat diterapkan melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), Alokasi Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) dan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE). Skema ini merupakan bagian dari adalah Ecological Fiscal Transfer (EFT).

Tercatat 43 pemerintah daerah telah mengimplementasikan skema tersebut, terdiri atas 4 provinsi, 36 kabupaten, dan 3 kota. Di Kalimantan Barat telah diadopsi skema TAKE di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah dan Sanggau (EFT-Indonesia, 2025). Sedangkan salah satu pemerintah kota yang akan juga mengadopsi adalah Pemerintah Kota Singkawang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029 mencatat penerapan EFT di Kota Singkawang dilakukan dalam bentuk Alokasi

Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE). Skema ini memberikan insentif keuangan kepada wilayah-wilayah yang menunjukkan kinerja baik pada aspek perlindungan lingkungan hidup, tata Kelola keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (RPJMD, 2025).

Kajian tentang *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) di Indonesia umumnya berfokus pada tataran provinsi atau kabupaten (EFT-Indonesia, 2025), sementara studi pada level kelurahan masih sangat terbatas. Selain itu, kajian lainnya menyebutkan indikator alokasi yang digunakan masih terbatas dan belum terstandardisasi secara operasional lintas tipologi wilayah, sehingga akuntabilitas dan keadilan distribusi insentif ekologis sulit dijamin (Maretaniandini & Ni'mah, 2025).

Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ALAKE di Kota Singkawang dalam konteks kebijakan EFT serta mengidentifikasi program-kegiatan-sub kegiatan yang strategis dalam mendukung indikator kinerja ALAKE Singkawang. Penelitian ini juga memberikan pemahaman empiris baru tentang implementasi EFT di level kelurahan, yang selama ini masih jarang dikaji. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang sistem insentif fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif-kualitatif yang menekankan pada identifikasi masalah, penggalian isu melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*), serta inventarisasi program dan kegiatan kelurahan yang relevan dengan peningkatan indikator alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi (alake) (Krueger & Casey, 2009). Pendekatan ini tentunya relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas terkait implementasi ALAKE di Kota Singkawang mendukung kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) dan perancangan insentif fiskal berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah terkait indikator ALAKE di Kota Singkawang. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD), laporan Bappeda, serta data lingkungan dan risiko ekologi, termasuk Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Singkawang. Adapun data primer dikumpulkan melalui diskusi dan wawancara dengan pemerintah kelurahan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lapangan. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan utama di setiap indikator ALAKE serta menentukan aksi prioritas yang relevan dengan nomenklatur kewenangan kelurahan.

Tahap kedua adalah penguraian masalah dan penentuan aksi melalui Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD diikuti oleh perwakilan dari seluruh 26 kelurahan di Kota Singkawang, yang terdiri atas lurah dan staf kelurahan. Kemudian, tahap ketiga adalah

inventarisasi program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan kewenangan kelurahan. Tahap ini bertujuan memetakan keterkaitan antara aktivitas kelurahan dengan indikator kinerja ALAKE. Sebab informasi kinerja menjadi penting dalam penyusunan tahapan perencanaan (Martínez Guzmán, 2020). Proses dilakukan melalui telaah dokumen resmi, termasuk rencana kerja dan anggaran kelurahan, laporan kegiatan OPD, serta wawancara dengan aparatur kelurahan. Pendekatan ini mengacu pada prinsip budget tagging yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara belanja publik dan tujuan keberlanjutan. Hasil akhir dari proses inventarisasi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan kelurahan mendukung pencapaian target ALAKE, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penyesuaian atau pengembangan program agar lebih efektif dalam mendorong peningkatan kualitas ekologi di tingkat kelurahan.

Terakhir, data dianalisis dengan menitikberatkan pada efektivitas partisipasi dalam kedua pendekatan tersebut untuk mengevaluasi tingkat efisiensi yang sesungguhnya, kemudian diikuti oleh paparan temuan utama, pembahasan mendalam, serta rekomendasi umum guna memperkuat penerapan pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan yang lebih optimal (Hassan et al., 2011). Metode ini tentunya melihat keterlibatan terkini dalam perencanaan perkotaan yang akhirnya memberikan gambaran umum dalam mengidentifikasi pola dari hasil FGD dan wawancara (Correia et al., 2023). Panduan Focus Group Discussion (FGD) dalam penelitian ini disusun secara terbuka namun terstruktur berdasarkan indikator kinerja ALAKE, meliputi tata kelola persampahan, penghijauan lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana. Pertanyaan bersifat eksploratif untuk menggali pengalaman dan pandangan peserta, namun diarahkan agar tetap selaras dengan variabel pengukuran seperti inovasi, partisipasi komunitas, dan efektivitas program kelurahan. Pendekatan ini memastikan diskusi menghasilkan pemetaan isu dan aksi prioritas yang relevan, sekaligus memvalidasi keterkaitan antara praktik partisipatif dan indikator ALAKE dalam konteks penganggaran hijau berbasis kinerja di Kota Singkawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN ALAKE KOTA SINGKAWANG

Dalam kerangka kesepakatan internasional, diakui pentingnya mekanisme untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melibatkan komunitas lokal dan pendanaan yang efektif (Duchelle et al., 2018). Dalam konteks penganggaran, ada perpaduan yang mendorong antara penganggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan mekanisme insentif (Hou et al., 2011).

Salah satu upaya untuk mengombinasikan antara penganggaran berbasis kinerja dan mekanisme insentif adalah skema EFT. Salah satu skema untuk pemerintah kota adalah ALAKE. Skema ini menciptakan mekanisme insentif melalui pendanaan transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat yang dapat direformulasi sesuai kewenangannya terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Haryanto, 2016). Upaya untuk mendorong hal tersebut adalah melalui reformulasi anggaran (Firdaus et al., 2025).

Kota Singkawang menjadi salah satu pionir di Kalimantan Barat yang mengintegrasikan ALAKE ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong kelurahan untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui insentif fiskal berbasis kinerja. Enam fokus indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) tata kelola persampahan, (2) penghijauan lingkungan pemukiman, dan (3) kesiapsiagaan bencana.

Penelitian ini juga mengeksplorasi model penilaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengukur kinerja pemerintah kelurahan. Pertama, dalam indikator tata kelola persampahan, dihitung ketersediaan angkutan sampah, jumlah inovasi pengelolaan sampah, jumlah komunitas masyarakat yang aktif dan terlibat dalam mengelola sampah dan program-kegiatan pemerintah kelurahan yang relevan. Kedua, penghijauan lingkungan pemukiman dihitung jumlah komunitas yang aktif terlibat dalam gerakan menanam pohon. Ketiga, kesiapsiagaan bencana dihitung sarana dan prasarana dalam mitigasi dan penanganan bencana karhutla atau banjir, kemudian program kegiatan pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model verifikasi dan validasi yang komprehensif untuk menghitung kinerja kelurahan dilakukan dengan pendekatan data statistik, data primer atau sekunder dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan self assesment. Penilaian dengan self assesment disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang dalam membuat formulir dan pengisian secara digital melalui masing-masing akun di tingkat pemerintah kelurahan.

Terakhir, tim penilai yang dipimpin oleh Bappeda dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Setda Pemerintahan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan memverifikasi hasil program-kegiatan di tingkat kelurahan berdasarkan data primer dan sekunder serta hasil self assesment dan data dari OPD terkait. Berikut rincian penilaian ALAKE Singkawang:

Tabel 2. Formulir Penilaian ALAKE Singkawang untuk Indikator Kinerja Lingkungan Hidup

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
Tata Kelola Sampah	50%	Ketersediaan Angkutan Sampah Rumah Tangga	20%	Rasio Ketersediaan Angkutan Sampah Roda Tiga terhadap Kebutuhan Angkutan (Agregat)	Kebutuhan Angkutan dihitung dengan jumlah penduduk dan Potensi Sampah (0,7 Kg/Jiwa) atau kapasitas sampah dihitung dengan kapasitas angkutan	Data Statistik/Assesment

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
		Inovasi Pengelolaan Sampah	30%	Interval: Nilai 3 = Inovasi 4 atau lebih Nilai 2 = Inovasi antara 2-3 Nilai 1 = Inovasi antara 1 Nilai 0 = Tidak Ada Inovasi	Inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau komunitas/individu Masyarakat dikeluarahan: (1) Daur ulang sampah menjadi Produk Berguna seperti kerajinan, Kompos, lainnya. (Satu produk daur ulang dinilai 1 inovasi) (2) Penyediaan Fasilitas Daur Ulang Sampah (kelurahan/Ke rjasama Pihak ketiga) (3) Bank Sampah di Kelurahan; (4) Tong Sampah difasilitas Publik secara terpilah terpilah, (5) Lainnya	Data Dinas Lingkungan Hidup Kalbar
		Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah	20%	Interval: Nilai 3 = Ada 3 Komunitas dan Aktif Nilai 2 = Ada 2 Komunitas dan Aktif Nilai 1 = Ada 1 Komunitas dan Aktif Nilai 0 = Tidak Ada Komunitas	Kelurahan memfasilitasi pembentukan komunitas-komunitas masyarakat untuk edukasi atau pengelolaan sampah ditingkat RW/RT, dan aktif melakukan kegiatan mendukung perngelolaan	Data Dinas Lingkungan Hidup Kalbar

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
					sampah Program Kegiatan yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui Dana Kelurahan atau Kerjasama pihak lain di Kelurahan.	
		Program/ kegiatan Kelurahan Mendukung pengelolaan	30%	Interval: Nilai 3 = 4 atau lebih Kegiatan Nilai 2 = 2-3 Kegiatan Nilai 1 = 1 Kegiatan Nilai 0 = Tidak Ada	Kegiatan diidentifikasi seperti: (1) Pelatihan kepada masyarakat Pemanfaatan Sampah. (Dinilai 1 kali pelaksanaan 1 kegiatann), (2) Penyediaan Fasilitas Daur Ulang Sampah; (teknologi terpat guna), (3) Pembuatan poster/baliho himbauan mengenai sampah kepada Masyarakat; (4) Penyediaan Tong Sampah pada fasilitas publik (Pasar, taman, Tempat Keramaian, dll), (5) Lomba kebersihan ditingkat RT/RT (6) kegiatan lainnya	Asessment Kelurahan

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
Penghijauan Lingkungan Pemukiman	17%	Gerakan Menanam Pohon Lingkungan Pemukiman Kelurahan	100%	Interval: Nilai 3 = Ada 3 Komunitas dan Aktif Nilai 2 = Ada 2 Komunitas dan Aktif Nilai 1 = Ada 1 Komunitas dan Aktif Nilai 0 = Tidak Ada Komunitas	Pemerintah kelurahan menfasilitasi gerakan menanam pohon/penghijauan melalui dana kelurahan atau kerjasama dengan pihak lainnya. Untuk penyediaan bibit dibagikan kepada Masyarakat, penanaman taman/fasilitas publik, penanaman kanan kiri jalan, penanaman mangrove, dan lain-lain	Assessment Kelurahan
Kesiapsiagaan Bencana	33%	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Potensi Bencana	50%	Nilai 3 = Ada 3 Sarpras dan Berfungsi Nilai 2 = Ada dua Sarpras dan Berfungsi Nilai 1 = Ada satu Sarpras dan Berfungsi Nilai 0 = Tidak Ada	Kelurahan memiliki sarana kesiapsiagaan bencana ditingkat kelurahan sesuai dengan potensi kebencanaan di wilayah kelurahan baik melalui dana kelurahan maupun kerjasama pihak lain. Sarana tersebut: (1) Alat pemadam Api Ringan (2) Alat Pemadam Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan rawan karhutla. (3) Sarpras	Assesment

Variabel	Bobot Variabel	Indikator	Bobot Indikator	Pengukuran	Keterangan	Sumber Data
					penanggulangan bencana banjir.	
		Program/ kegiatan pemberdayaan Masyarakat menegani kesiapsiagaan bencana	50%	Nilai 3 = Ada tiga kegiatan setahun Nilai 2 = Ada dua kegiatan setahun Nilai 1 = Ada satu kegiatan setahun Nilai 0 = Tidak Ada	Upaya kelurahan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, yang didanai oleh kelurahan maupun kerjasama dengan pihak lainnya: (1) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; (2) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; (3) Edukasi manajemen proteksi kebakaran; (4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	Asessment

Sumber: Bappeda Kota Singkawang, 2025

Penilaian di atas dihitung berdasarkan rasio, interval dan nilai yang telah disepakati oleh Tim Penilai ALAKE Kota Singkawang. (Norman, 2001) Penilaian akan dihitung berdasarkan data yang masuk melalui sistem aplikasi ALAKE Singkawang yang tertera pada halaman website <https://bappeda.singkawangkota.go.id/> yang nantinya akan diinput oleh pemerintah kelurahan masing-masing pada periode akhir tahun anggaran berjalan. Penilaian akan dilakukan oleh tim penilaian yang telah disebutkan di atas sesuai dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 000.7/177.1/BD-01.PPE Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Kinerja Ekologis. Penilaian kinerja ini tentunya memperkuat aktivitas reformasi desentralisasi fiskal dalam memastikan penggunaan sumber daya terdesentralisasi oleh pemerintah daerah (Funk & Owen, 2020). Tentunya penilaian ini memberikan peluang yang cukup besar untuk

meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam memperkuat arah kinerja dari anggaran dana kelurahan dalam mendukung capaian pembangunan daerah di Kota Singkawang.

BUDGET TAGGING DAN INTEGRASI KEBERLANJUTAN

Dalam proses adopsi EFT dalam hal ini adalah kebijakan ALAKE Singkawang. Penting untuk menunjukkan konteks lokal dalam desain indikator kinerja yang berbasis pada peningkatan kualitas lingkungan hidup atau ekologi (Busch et al., 2021). Pendekatan penganggaran hijau menyediakan beragam mekanisme serta teknik yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif ramah lingkungan ke dalam proses penyusunan anggaran. Salah satu instrumen utama yang banyak diterapkan adalah penandaan anggaran (budget tagging). Melalui instrumen ini, setiap komponen atau langkah dalam siklus anggaran dievaluasi dan diberikan label sesuai dengan tingkat kontribusinya terhadap tujuan lingkungan. Tujuan tersebut dapat mencakup isu-isu iklim maupun aspek ekologis lainnya, seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian polusi udara, serta pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya air. Data yang dihasilkan dari proses pelabelan ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal secara keseluruhan mendukung atau justru berdampak terhadap sasaran lintas sektor di bidang iklim dan lingkungan (OECD, 2021). Dalam mengurainya,

Dengan menggunakan model uraian masalah pada kelompok kelurahan di FGD (dilihat dari table 2 kajian literatur). Keterlibatan 26 kelurahan dibagi kelompok berdasarkan data statistik yang menunjukkan kelurahan tersebut memiliki masalah yang sedang dihadapi. Pembagian kelompok tersebut, berisikan setidaknya 4-5 kelurahan per kelompok. Setiap kelompok mengurai permasalahan yang selama ini dihadapi di lapangan dan merampung aspirasi dari masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uraian masalah yang ada tidak bisa ditangani oleh kelurahan sendiri. Olahan hasil kelompok pada FGD tersebut menemukan ruang kolaborasi bersama yang melibatkan lintas stakeholder untuk menangani masalah yang kompleks. Berikut grafik yang mengidentifikasi dukungan para pihak di tingkat kelurahan.

Gambar 1 menunjukkan, pemerintah kelurahan membutuhkan dukungan dari program-kegiatan OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memperkuat kapasitas komunitas masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup dan kebencanaan (karhutla dan banjir) termasuk dukungan sarana prasarana di tingkat kelurahan. Kemudian Bagian Setda Pemerintahan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk pendampingan belanja anggaran yang sesuai dan akuntabel di tingkat kelurahan agar anggaran yang dikeluarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Dinas Kesehatan untuk masalah stunting, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja untuk menangani masalah kompetensi masyarakat dalam mengakses pekerjaan. Terakhir Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyelaraskan program pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di tingkat kelurahan.

Gambar 1 Dukungan Lintas Stakeholder dalam Mengatasi Masalah Sesuai Indikator ALAKE Singkawang



Sumber: diolah dari hasil FGD, 2025

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sektora swasta dapat terlibat dalam mendukung program di tingkat kelurahan. Temuan FGD menyebutkan perusahaan-perusahaan yang berbasis di kelurahan telah mendorong adanya orang tua asuh untuk stunting dan mendukung kegiatan pemberdayaan yang melibatkan komunitas local. Termasuk dalam menangani kebakaran yang melibatkan Yayasan Sosial lokal yang memiliki sarana dan prasarana memadai seperti alat pemadam kebakaran dan kendaraannya.

Hasil penelitian juga merampung model budget tagging dengan uraian yang dijelaskan pada Tabel 3 diatas. Hasil menunjukkan bahwa kelurahan mengidentifikasi setidaknya kewenangan dukungan terhadap belanja sarana dan prasana berupa fisik serta dukungan belanja terhadap kelurahan berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai nomenklatur dalam bentuk sub kegiatan. Berikut tabel yang menginvetarisasi sub kegiatan pada isu terkait:

Tabel 3. Hasil Inventarisasi Aksi yang Dihubungkan dengan Kode Subkegiatan berdasarkan Kewenangan Kelurahan

No	Variabel	Aksi yang Diusulkan	Jumlah Sub Kegiatan (Sesuai Nomenklatur)
1	Tata Kelola Persampahan	Kelurahan mengganggu sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan Kerjasama para pihak	5 sub kegiatan (terdiri dari 3 sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 2 sub kegiatan pemberdayaan masyarakat)
2	Penghijuan Lingkungan Pemukiman	Kegiatan penanaman bibit dengan pemberdayaan masyarakat	1 sub kegiatan (kegiatan pemberdayaan masyarakat)
3	Kesiapsiagaan Bencana	Penyiapan perlengkapan, program mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat	9 sub kegiatan (terdiri dari 5 sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 4 sub kegiatan pemberdayaan masyarakat)

Sumber: Hasil FGD, 2025

Tabel 3 menjelaskan bahwa jumlah sub kegiatan merupakan hasil bugdet tagging dalam rangka merespon tiga variabel yang menjadi kinerja dalam ALAKE Singkawang. Rinciannya kegiatan sub kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur belanja pemerintah kelurahan dimulai dari penyediaan alat angkut dan tempat sampah, pengadaan daur ulang sampah, alat pemadam kebakaran, pembuatan embung dan pemeliharaan drainase, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari peningkatan kapasitas, kerjasama, dan operasionalisasi kelompok masyarakat terkait.

Hasil diskusi dan wawancara secara kelompok juga menunjukkan bahwa kegiatan yang dialokasikan selama ini belum direlasikan terhadap dukungan para pihak yang dapat dilakukan secara sinergis. Seperti keterlibatan di OPD terkait, pihak swasta, dan jejaring komunitas di tingkat kelurahan. Padahal, kemampuan belanja di kelurahan dapat mengakselerasi tiap-tiap stakeholder untuk mencapai kinerja yang diinginkan melalui kategori belanja yang sudah disesuaikan dengan target kinerja pemerintah daerah dalam merespon masalah yang ada.

Selain itu, tiap-tiap sub kegiatan telah didorong untuk memaksimalkan output kegiatan dalam berkolaborasi dengan kelompok masyarakat. Hasil FGD mendorong akselerasi dengan keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Siaga Singkawang, Kader Siaga Sampah Singkawang (3S), anggota perlindungan masyarakat (Linmas), kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan perangkat RT/RW. Tentunya ini selaras dengan memperkuat penerapan pendekatan partisipatif dalam proses dan implementasi yang lebih optimal (Hassan et al., 2011).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) di Kota Singkawang merupakan bentuk inovasi kebijakan fiskal yang mengadaptasi prinsip *Ecological Fiscal Transfer (EFT)* dalam konteks tata kelola keuangan daerah. Melalui pendekatan partisipatif dan mekanisme *budget tagging*, ALAKE mampu menghubungkan dimensi fiskal, sosial, dan ekologis secara terintegrasi di tingkat kelurahan. Proses pelaksanaan yang melibatkan tahap identifikasi masalah, forum diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), serta inventarisasi program dan subkegiatan menghasilkan peta aksi prioritas yang relevan dengan indikator kinerja di tingkat kelurahan. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, kesiapsiagaan bencana, menunjukkan bahwa ALAKE berkontribusi terhadap penguatan tata kelola fiskal, isu kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas administratif, kesenjangan data kinerja, dan belum optimalnya sistem insentif berbasis hasil. Oleh karena itu, penguatan dukungan teknis, integrasi data antar OPD terkait, dan penyempurnaan mekanisme penghargaan fiskal berbasis kinerja menjadi kunci untuk keberlanjutan ALAKE.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan analisis kuantitatif terhadap dampak fiskal dan lingkungan sebelum dan sesudah penerapan ALAKE, serta pengembangan model komparatif antar-daerah untuk menilai efektivitas skema *Ecological Fiscal Transfer* di

berbagai konteks sosial dan kelembagaan. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana ALAKE mampu mendorong perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiani, D., Roslinda, E., Widiastuti, T., Ekamawanti, H. A., Ekyastuti, W., Dwianto, W., Alfikri, F., & Ngidu, E. Y. (2024). Stand growth and carbon stocks of community-based mangrove rehabilitation in Singkawang City, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 25(7). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d250701>
- Busch, J., Ring, I., Akullo, M., Amarjargal, O., Borie, M., Cassola, R. S., Cruz-Trinidad, A., Droste, N., Haryanto, J. T., Kasymov, U., Kotenko, N. V., Lhkagvadorj, A., De Paulo, F. L. L., May, P. H., Mukherjee, A., Mumbunan, S., Santos, R., Tacconi, L., Verde Selva, G., ... Zhou, K. (2021). A global review of ecological fiscal transfers. *Nature Sustainability*, 4(9), 756–765. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00728-0>
- Correia, D., Feio, J. E., Marques, J., & Teixeira, L. (2023). Participatory methodology guidelines to promote citizens participation in decision-making: Evidence based on a Portuguese case study. *Cities*, 135, 104213. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104213>
- Droste, N., Ring, I., Santos, R., & Kettunen, M. (2018). Ecological Fiscal Transfers in Europe – Evidence-Based Design Options for a Transnational Scheme. *Ecological Economics*, 147, 373–382. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.031>
- Duchelle, A. E., Simonet, G., Sunderlin, W. D., & Wunder, S. (2018). What is REDD+ achieving on the ground? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 32, 134–140. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.07.001>
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020–2024*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- EFT Indonesia. (2024). *EFT Indonesia*. <https://eftindonesia.org/>
- Firdaus, F., Patriani, I., & Nafi'ah, B. A. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGIS MELALUI REFORMULASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA. 15(03). <https://doi.org/10.33005/jdg.v15i3.5345>
- Funk, K. D., & Owen, E. (2020). Consequences of an Anti-Corruption Experiment for Local Government Performance in Brazil. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(2), 444–468. <https://doi.org/10.1002/pam.22200>
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (2024, 25 Juni). *Transparansi anggaran stagnan, penganggaran partisipasi rendah dan pengawasan anggaran lemah: Peringkat OBS Indonesia turun*. <https://seknasfitra.org/transparansi-anggaran-stagnan-partisipasi-penganggaran-rendah-dan-pengawasan-anggaran-lemah-peringkat-obs-indonesia-turun>
- Galasso, E., & Ravallion, M. (2005). Decentralized targeting of an antipoverty program. *Journal of Public Economics*, 89(4), 705–727. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.01.002>

- Haryanto, J. T. (2016). Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 252. <https://doi.org/10.22146/jsp.13140>
- Hassan, G. F., El Hefnawi, A., & El Refaie, M. (2011). Efficiency of participation in planning. *Alexandria Engineering Journal*, 50(2), 203–212. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2011.03.004>
- Hou, Y., Lunsford, R. S., Sides, K. C., & Jones, K. A. (2011). State Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of the States. *Public Administration Review*, 71(3), 370–388. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02357.x>
- Irawan, S., Tacconi, L., & Ring, I. (2014). Designing intergovernmental fiscal transfers for conservation: The case of REDD+ revenue distribution to local governments in Indonesia. *Land Use Policy*, 36, 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.07.001>
- Kalirajan, K., & Otsuka, K. (2012). Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis. *World Development*, 40(8), 1511–1521. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2009). *Focus groups: A practical guide for applied research* (3. ed., [repr.]). Sage Publ.
- Lisanyoto, L., Supriatna, & Sumadio, W. (2019). Spatial Model of Settlement Expansion and its Suitability to the Landscapes in Singkawang City, West Kalimantan Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 338(1), 012034. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/338/1/012034>
- Martínez Guzmán, J. P. (2020). The Use of Performance Information Under Performance Budgeting Systems: A Comparative Analysis of Chilean Line Ministries. *International Public Management Journal*, 23(4), 591–610. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1486344>
- Maretaniandini, S. T., & Ni'mah, Z. (2025). Tinjauan Best-Practice Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia: Sebuah Systematic Literature Review. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i1.2615>
- OECD. (2021). *Green Budget Tagging: Introductory Guidance & Principles*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fe7bfcc4-en>
- Pemerintah Kota Singkawang. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Mengenal Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2025–2029*. Pemerintah Kota Singkawang.
- Schröter-Schlaack, C., Ring, I., Koellner, T., Santos, R., Antunes, P., Clemente, P., Mathevet, R., Borie, M., & Grodzińska-Jurczak, M. (2014). Intergovernmental fiscal transfers to support local conservation action in Europe. *Zeitschrift Für Wirtschaftsgeographie*, 58(1), 98–114. <https://doi.org/10.1515/zfw.2014.0007>
- Widiastuti, T., Astiani, D., Roslinda, E., Ekyastuti, W., & Ekamawanti, H. A. (2024). Mangrove land cover changes in North Singkawang, West Kalimantan, Indonesia analyzed using Landsat 8 images. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 25(9). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d250938>